

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

#### **a. Perkembangan Inflasi Sulsel**

Pada Desember 2025, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi 0,49% (mtm), setelah sebelumnya mengalami inflasi pada November 2025 sebesar deflasi 0,07% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi Sulsel sampai dengan Desember 2025 tercatat sebesar 2,84% (ytd), sejalan dengan inflasi tahunannya (2,84%; yoy), serta lebih rendah dibandingkan Nasional yang mencatatkan inflasi 2,92% (yoy). Inflasi Desember 2025 terutama didorong oleh tingginya permintaan terhadap komoditas pangan, baik dari dalam maupun luar daerah sejalan dengan pola historis jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru), khususnya cabai rawit dan daging ayam. Inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh deflasi pada komoditas cabai merah, beras, dan ikan bandeng seiring pasokan yang terjaga dan penyaluran program bantuan pangan. Memperhatikan perkembangan tersebut, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi tahunan pada Desember 2025 sebesar 2,84% (yoy), terjaga dalam rentang sasaran inflasi Nasional  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).

Secara bulanan, inflasi di Sulsel terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi 1,34% (mtm) dengan andil sebesar 0,41% (andil mtm) yang didorong tingginya permintaan atas komoditas pangan, khususnya cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras. Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga komoditas dalam Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya dengan andil sebesar 0,08% (andil mtm), khususnya harga emas perhiasan yang terjaga pada level yang tinggi. Selain itu, Kelompok Transportasi juga tercatat sebagai penyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,02% (andil mtm), didorong kenaikan harga angkutan antarkota dan bensin seiring tingginya mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru serta kenaikan harga BBM non-subsidi.

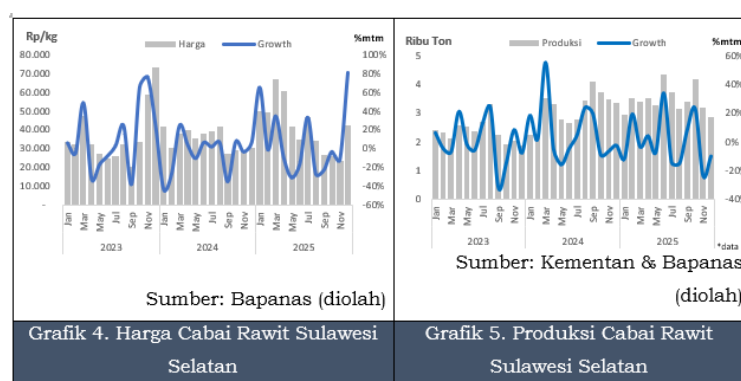
Seiring normalisasi permintaan pasca-HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru), tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2026 diperkirakan berada pada rentang -0,01% s.d. 0,79% (mtm). Prakiraan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2025. Adapun rata-rata inflasi bulan Januari dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 0,08% (mtm). Tekanan inflasi diperkirakan melandai seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pascaperiode HBKN Nataru sebagaimana pola historisnya, terutama pada kelompok komoditas pangan dan transportasi. Selain itu, kondisi gelombang laut relatif kondusif pada kategori rendah-menengah (0,5–1,5 meter) sehingga mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap. Kondisi tersebut diperkirakan turut mendukung terjaganya pasokan komoditas perikanan pada periode mendatang. Namun demikian, masih terdapat risiko inflasi pangan yang perlu dicermati, antara lain masih berlangsungnya musim tanam padi serta kondisi cuaca. Pada Januari 2026, curah hujan di Sulawesi Selatan diperkirakan berada pada kisaran Normal hingga Atas Normal (51 hingga >500 mm), khususnya di wilayah bagian barat dan sebagian utara yang diperkirakan dapat memengaruhi produktivitas hortikultura.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng kepada 589 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah direalisasikan pada triwulan IV 2025 berpotensi menjadi salah satu sumber risiko inflasi pangan pada awal tahun 2026, terutama apabila tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.

## b. Perkembangan Harga Kebutuhan

**b.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** pada Desember 2025 mencatatkan inflasi dengan andil 0,41% (andil mtm), setelah sebelumnya mencatatkan deflasi dengan andil sebesar -0,13% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 1,34% (mtm), lebih tinggi dari sebelumnya yang tercatat -0,45% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga berbagai komoditas pangan strategis di masyarakat, seperti cabai rawit (0,18%; andil mtm), daging ayam ras (0,11%; andil mtm), dan bawang merah (0,08%; andil mtm). Kenaikan harga tersebut didorong oleh tingginya permintaan, baik dari dalam maupun luar daerah sejalan dengan pola historis jelang HBKN Nataru. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komoditas cabai merah (-0,03%; andil mtm) dan beras (-0,02%; andil mtm), seiring pasokan yang terjaga di tengah percepatan penyaluran program bantuan pangan.

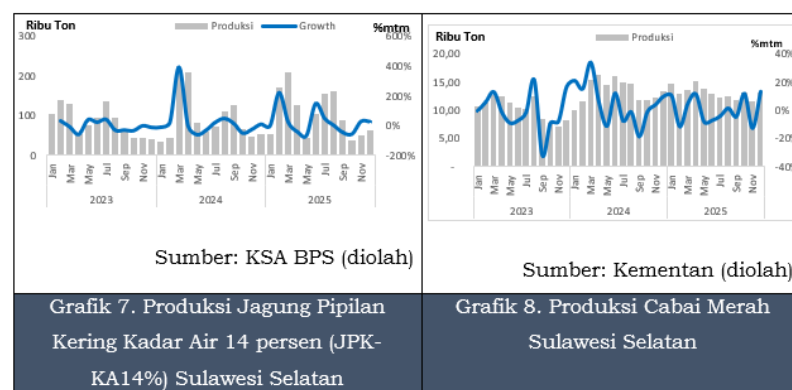
Komoditas cabai rawit menjadi komoditas utama pendorong inflasi pada Desember 2025. Komoditas ini mencatat inflasi sebesar 104,70% (mtm) dengan andil 0,18% (andil mtm). Berdasarkan hasil survei pemantauan harga di Sulawesi Selatan, rata-rata harga cabai rawit di pasar tradisional meningkat signifikan dari Rp23.281/kg pada November 2025 menjadi Rp42.198/kg pada Desember 2025. Kenaikan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat penurunan produksi sebesar 10,48% (mtm) di tengah permintaan yang tetap tinggi. Selain itu, meningkatnya permintaan dari luar daerah yang tercermin dari kenaikan pasokan keluar sebesar 18,56% (mtm), turut memperkuat tekanan inflasi cabai rawit pada periode laporan.



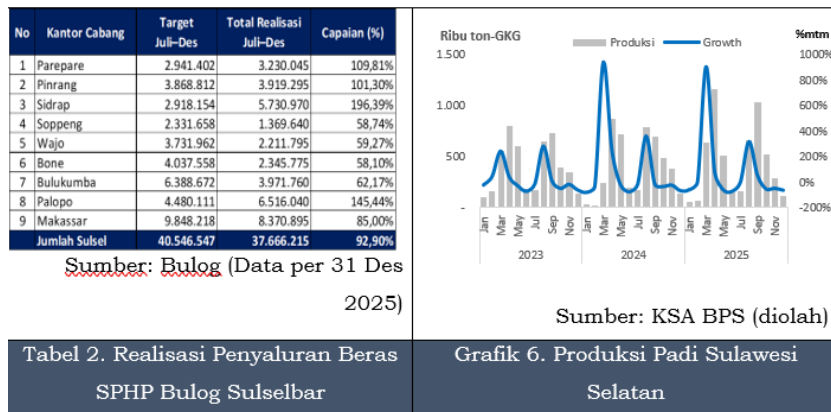
Komoditas hortikultura lainnya yang turut mencatat inflasi pada Desember 2025 adalah bawang merah. Bawang merah mencatat inflasi sebesar 24,66% (mtm) dengan andil 0,08% (andil mtm) pada Desember 2025. Berdasarkan hasil survei pemantauan harga di Sulawesi Selatan, rata-rata harga bawang merah di tingkat konsumen meningkat dari Rp36.573/kg pada November 2025 menjadi Rp46.018/kg pada Desember 2025. Kenaikan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan, sejalan dengan penurunan prakiraan produksi bawang merah sebesar 18,24% (mtm) menjadi 28,18 ribu ton dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 38,02 ribu ton.

Selain itu, Daging Ayam Ras juga tercatat menjadi komoditas penyumbang inflasi sebesar 11,67% (mtm) dengan andil sebesar 0,11% (andil mtm). Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, rata-rata harga jagung pakan di tingkat peternak Sulawesi Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp6.397/kg, meningkat 2,07% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp6.267/kg. Kenaikan harga jagung tersebut turut mendorong penyesuaian harga daging ayam ras, yang meningkat dari Rp29.483/kg pada November 2025 menjadi Rp33.195/kg pada Desember 2025. Perkembangan ini terjadi di tengah proyeksi peningkatan produksi jagung pipilan kering (JPK) di Sulawesi Selatan sebesar 27,00%, dari 50,58 ribu ton menjadi 64,24 ribu ton. Selain itu, informasi anekdotal mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging ayam ras juga sejalan dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung secara bertahap di wilayah timur Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan dan sekitarnya, sehingga meningkatkan permintaan daging ayam ras.

Tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dapat tertahan oleh komoditas cabai merah yang mengalami deflasi 19,33% (mtm) dengan andil sebesar -0,03% (andil mtm). Penurunan harga cabai merah sejalan dengan peningkatan produksi cabai merah di Sulawesi Selatan yang diperkirakan tumbuh sebesar 13,11% (mtm), sehingga turut mendukung terjaganya kecukupan pasokan di pasar. Sejalan dengan itu, Neraca Pangan Bapanas menunjukkan bahwa komoditas cabai merah berada pada kondisi surplus sebesar 1.071 ton pada Desember 2025. Kondisi ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga periode bulan berikutnya, sehingga dapat meredam tekanan inflasi pangan yang lebih tinggi di Sulawesi Selatan.



Selain itu, komoditas beras juga menjadi penahan inflasi yang lebih tinggi pada Desember 2025. Beras mencatatkan deflasi 0,53% (mtm) dengan andil sebesar -0,02% (andil mtm). Meskipun produksi beras Sulawesi Selatan tercatat menurun sebesar 59,63% (mtm) seiring berakhirnya periode panen, tekanan harga relatif mereda sejalan dengan terjaganya pasokan dan kelancaran distribusi di pasar. Kondisi tersebut ditopang oleh penguatan distribusi beras SPHP, serta penyaluran program bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang telah menjangkau sekitar 260 ribu PBP selama Desember 2025. Selain itu, akselerasi penyaluran beras SPHP turut berperan dalam menahan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau (Mamin), sebagaimana tercermin dari percepatan realisasi penyaluran yang meningkat dari 70,69% pada November 2025 menjadi 92,90% pada Desember 2025 dari target 40,55 ribu ton, sehingga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar.



Secara tahunan, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Desember 2025 menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 4,46% (yoy) dengan andil mencapai 1,36% (andil yoy). Tekanan inflasi tersebut relatif melandai dibandingkan November 2025 yang tercatat inflasi sebesar 4,18% (yoy) dengan andil mencapai 1,27% (andil yoy). Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan disumbangkan oleh beras, cabai rawit, ikan bandeng, sigaret kretek mesin (SKM), daging ayam ras, dan telur ayam ras. Adapun beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, antara lain tomat, bawang putih, kacang panjang, dan ikan gabus.

**b.2. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** pada Desember 2025 memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,08% (andil mtm), sedikit lebih tinggi dibanding realisasi November 2025 dengan andil inflasi sebesar 0,07% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,88% (mtm). Inflasi pada kelompok ini terutama dipicu oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan yang mencatat inflasi sebesar 3,30% (mtm) dengan andil sebesar 0,08% (andil mtm), meningkat dibanding November 2025 yang tercatat sebesar 3,03% (mtm) dengan andil 0,07% (andil mtm). Harga rata-rata emas global pada Desember 2025 tercatat sebesar \$4.282,54/oz, meningkat 4,78% (mtm) dibanding November 2025 yang sebesar \$4.087,19/oz.

Secara tahunan, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Desember 2025 mencatatkan inflasi sebesar 14,47% (yoy) dengan andil 1,12% (andil yoy), lebih tinggi dari realisasi November 2025 yang sebesar 13,35% (yoy) dengan andil 1,04% (andil yoy). Emas perhiasan masih menjadi komoditas penyumbang inflasi utama sebesar 64,60% (yoy) dengan andil sebesar 1,00% (andil yoy), merespons harga emas global yang masih naik.

**b.3. Di sisi lain, Kelompok Transportasi** pada Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) dengan andil 0,02% (andil mtm), berbalik arah dari kondisi deflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,07% (mtm) dengan andil -0,01% (andil mtm). Secara komoditas, tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan tarif angkutan antarkota dan harga bensin, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru serta penyesuaian harga BBM non-subsidi.

No.	Jenis BBM	Harga (Rp/liter)		Pembelian (mtm)
		Nov-25	Dec-25	
1	Pertam ax	12.500	13.050	4,40%
2	Pertam ax Turbo	13.400	14.050	4,85%
3	Dexite	14.200	15.000	5,63%
4	Pertam ina Dex	14.500	15.000	3,45%
5	Pertam ax diPertashop			4,44%

*Sumber: Pertamina, diolah*

**Tabel 3. Harga BBM Non-subsidi Provinsi Sulawesi Selatan  
Desember 2025**

Namun demikian, tekanan inflasi pada kelompok Transportasi tertahan oleh deflasi komoditas tarif angkutan udara sebesar 1,93% (mtm) dengan andil -0,01% (andil mtm). Deflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan diskon tarif tiket pesawat oleh pemerintah sebesar 13-14% untuk periode pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Deflasi tarif angkutan udara terjadi meskipun harga avtur di Bandara Sultan Hasanuddin tercatat meningkat sebesar 5,70% (mtm), dari Rp15.047,76 per liter menjadi Rp15.904,77 per liter pada Desember 2025.

Secara tahunan, Kelompok Transportasi pada Desember 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,42% (yoy) dengan andil 0,05% (andil yoy). Realisasi ini lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tercatat inflasi 0,35% (yoy) dengan andil 0,04% (andil yoy). Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh komoditas bensin dengan andil 0,02% (andil yoy), diikuti dengan angkutan antar kota (0,02%; andil yoy), dan perbaikan ringan kendaraan (0,01%; andil yoy).

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Seiring normalisasi permintaan pasca-HBKN Nataru, tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan Januari 2026 diperkirakan berada pada rentang -0,01% s.d. 0,79% (mtm). Prakiraan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2025. Adapun rata-rata inflasi bulan Januari dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 0,08% (mtm). Tekanan inflasi diperkirakan melandai seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca periode HBKN Nataru, sebagaimana pola historisnya, terutama pada kelompok komoditas pangan dan transportasi. Selain itu, kondisi gelombang laut relatif kondusif pada kategori rendah sampai dengan menengah (0,5-1,5 meter) sehingga mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap. Kondisi tersebut diperkirakan mendukung terjaganya pasokan komoditas perikanan pada periode mendatang, sejalan dengan pasokan tanaman pangan yang tetap memadai sebagaimana tercermin dari neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus.

Komoditas	Neraca (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Ketahanan Stok (Hari)
Beras	1.563.837	1.649.947	86.110	561
Jagung	94.846	194.785	99.939	29
Kedelai	- 878	3.242	4.121	- 7
Bawang Merah	42.179	48.572	6.393	263
Bawang Putih	- 1.338	223	1.562	- 26
Cabai Besar	1.071	2.223	1.152	29
Cabai Rawit	408	2.755	2.348	5
Daging Sapi/Kerbau	14.168	15.823	1.655	229
Daging Ayam Ras	40.020	50.000	9.980	124
Telur Ayam Ras	68.550	87.138	18.587	113
Gula Pasir	25.222	30.158	4.936	158
Minyak Goreng	10.987	17.741	6.755	50

*Sumber: Bapanas, diolah*

**Tabel 4. Neraca Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2025**

Dari sisi transportasi, tekanan harga tiket pesawat diperkirakan tetap terjaga seiring kebijakan pemerintah berupa pemberian diskon tarif angkutan udara hingga 14% untuk periode pembelian tiket 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Selain itu, tekanan harga juga tertahan oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi pada seluruh jenis bahan bakar pada Januari 2026 yang tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan, sehingga turut menahan tekanan inflasi kelompok transportasi.

No.	Jenis BBM	Harga (Rp/liter)		Perubahan (mtm)
		Dec-25	Jan-26	
1	Pertamax	13.050	12.650	-3,07%
2	Pertamax Turbo	14.050	13.700	-2,49%
3	Dexlite	15.000	13.800	-8,00%
4	Pertamina Dex	15.000	13.900	-7,33%
5	Pertamax di Pertashop	12.950	12.550	-3,09%

*Sumber: Pertamina, diolah*

**Tabel 5. Harga BBM Non-subsidi Provinsi Sulawesi Selatan Januari 2026**

Namun demikian, masih terdapat risiko inflasi pangan yang perlu dicermati, antara lain berasal dari masih berlangsungnya musim tanam padi serta kondisi cuaca. Pada Januari 2026, curah hujan di Sulawesi Selatan diperkirakan berada pada kisaran Normal hingga Atas Normal (51 hingga >500 mm), khususnya di wilayah bagian barat dan sebagian utara yang diperkirakan dapat memengaruhi produktivitas hortikultura. Selain itu, penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng kepada 589 ribu PBP yang telah direalisasikan pada triwulan IV 2025 berpotensi menjadi salah satu sumber risiko inflasi pangan pada awal tahun 2026, terutama apabila tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.

Dalam mendorong penguatan pengendalian inflasi, TPID se-Sulawesi Selatan juga senantiasa berupaya aktif untuk memitigasi risiko tekanan melalui berbagai langkah strategis, seperti penyelenggaraan operasi pasar secara reguler di seluruh kab/kota, kegiatan sidak pasar rutin untuk monitoring perkembangan harga pangan strategis di pasar-pasar tradisional, mendorong penguatan produktivitas pertanian, penjajakan kerjasama antar daerah (KAD), dan komunikasi efektif berupa himbauan belanja bijak dan pangan mandiri.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan sejumlah upaya pengendalian harga pangan selama Triwulan III 2025, sebagai berikut:

- K1 Keterjangkauan Harga:
  1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada momen HBKN.
  2. Sidak pasar, sidak gudang distributor, dan sidak gudang BULOG dalam rangka pemantauan harga.
  3. Optimalisasi program *Mini Distribution Centre (MDC)* untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis masyarakat dengan harga terjangkau sesuai HET pada beberapa pasar di kota IHK dan akan diperluas pada kota-kota non-IHK lainnya.
  4. Koordinasi aktif antara TPID dengan *stakeholders* dalam *review* Kebijakan *Administered Price* di daerah.
  5. Mendorong pemanfaatan dana APBD untuk program pengendalian inflasi dan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
- K2 Ketersediaan Pasokan:
  1. Peningkatan produksi pangan melalui Program Luas Tambah Tanam, mandiri benih, perbaikan irigasi, termasuk implementasi varietas benih unggul.
  2. Dukungan/fasilitasi alat dan mesin penunjang produksi melalui penyaluran PI-KEKDA, termasuk penerapan *digital farming* hulu pada komoditas padi maupun hortikultura (bawang merah dan cabai) untuk efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.
  3. Gerakan Menanam Pangan Strategis di lingkungan kerja/pekarangan kosong (*urban farming*), misalnya Gerakan Tanam Cabai oleh ASN di Luwu Timur, Selayar Gemerlap, Gemoih di Bulukumba, dan Jeneponto Bahagia (cabai, bawang merah).
  4. *Launching* Gerakan Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Barru pada lahan tadah hujan seluas 180 hektar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
- K3 Kelancaran Distribusi
  1. Implementasi program SIPEPPA, yakni program kerja sama antara Pemerintah dan toko ritel untuk distribusi bahan pangan. Untuk tahun ini, akan didorong perluasan pada beberapa ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
  2. Penandatanganan MoU KAD, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sampai dengan November 2025, telah terdapat 5 KAD yaitu KAD intra Sulsel dan KAD antara Sulsel dengan Sulut dan Kaltara.
  3. Dukungan subsidi ongkos angkut dan fasilitasi distribusi pangan, terutama bagi kota IHK di Sulsel.
  4. Program peningkatan pemasaran digital (*digital farming* sisi hilir) melalui program *onboarding* UMKM pangan pada platform *e-commerce/social commerce*.
- K4 Komunikasi Efektif
  1. HLM untuk stabilisasi harga pangan secara reguler di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya untuk sinergi bersama program pengendalian inflasi pada momen HBKN.
  2. Kegiatan edukasi perkembangan inflasi kepada masyarakat melalui media (siaran pers, media sosial, *media gathering*, *talk show*, dan lainnya).
  3. Sosialisasi dan edukasi belanja bijak secara rutin berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, *influencer*, maupun Pimpinan Daerah.
  4. Optimalisasi pemanfaatan website neraca pangan SIGAP SULTAN (Sistem Informasi



Harga dan Pasokan Pangan Sulawesi Selatan) oleh anggota TPID Sulsel untuk membantu perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan relatif stabil dibandingkan tahun 2025 dan tetap terjaga dalam rentang sasaran  $2,5 \pm 1\%$  (yoy). Dari sisi permintaan domestik, perbaikan daya beli masyarakat diperkirakan mendorong peningkatan konsumsi, sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,2%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun 2024 yang sebesar 6,5%, serta mulai diimplementasikannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan strategis. Dari sisi administered prices, tekanan inflasi relatif tertahan seiring tidak adanya penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) maupun kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berada pada level lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga berpotensi menahan inflasi bensin dan inflasi tahunan secara keseluruhan. Selain itu kondisi ENSO berada pada fase La Nina lemah dan diperkirakan bertahan hingga pertengahan tahun 2026 yang dapat mendukung produktivitas komoditas pangan. Selain itu, Pemerintah kembali berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sebesar 740 ribu ton kepada sekitar 18 juta PBP secara nasional yang akan disalurkan selama empat bulan pada tahun 2026, sehingga turut menopang daya beli masyarakat dan menahan tekanan permintaan di pasar. Selain itu, keberlanjutan program SPHP serta penyaluran Minyakita diperkirakan mampu menjaga kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis. Namun demikian, risiko inflasi pangan masih perlu dicermati, terutama seiring prakiraan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada periode Desember 2025–Februari 2026 di wilayah barat Sulawesi Selatan yang merupakan sentra utama hortikultura. Selain itu, potensi banjir pada Februari 2026 di wilayah Pangkep, Maros, Gowa, dan Takalar berisiko menurunkan produktivitas tanaman pangan dan perikanan budidaya (khususnya ikan bandeng), mengganggu kelancaran distribusi, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan harga sejumlah komoditas pangan strategis di Sulawesi Selatan.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga. Pemerintah berkomitmen mendukung pencapaian swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), peningkatan infrastruktur pertanian, serta modernisasi sektor agribisnis. Penguatan produksi dan serapan beras terus didorong, sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2026 serta rencana peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, yang diharapkan mendukung stabilitas harga beras. Dalam konteks Sulawesi Selatan, dukungan penguatan hulu pertanian tercermin dari alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 846.721 ton, meningkat 27,65% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta berlanjutnya Program Mandiri Benih untuk penyediaan bibit unggul kepada petani. Selain itu, pada awal tahun 2026 Pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada 812 kelompok tani di 24 kabupaten/kota, antara lain berupa 47 unit combine harvester, 145 unit hand tractor, 8.655 unit hand sprayer, 175 unit traktor roda empat, dan 11 unit cultivator, guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selanjutnya, upaya pengendalian harga oleh TPID se-Sulawesi Selatan tetap dilaksanakan dalam kerangka strategi 4K sepanjang tahun 2025, melalui implementasi berbagai program unggulan GNPIP seperti operasi pasar, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), urban farming,

pengembangan klaster pangan, High Level Meeting (HLM), serta penguatan kelancaran distribusi. Sinergi kebijakan tersebut diperkirakan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pasokan pangan diperkirakan terjaga seiring upaya pengendalian harga oleh TPID dalam kerangka strategi 4K disertai dengan program unggulan GNPIP, yakni operasi pasar, Kerjasama Antar Daerah, urban farming, pengembangan klaster, *High Level Meeting*, dan kelancaran distribusi. Kegiatan Gelar Pangan Murah dan *Mini Distribution Center* (MDC) juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun dengan melibatkan distributor komoditas pangan.

Strategi khusus sebagai upaya menjaga stabilisasi harga di Sulsel ke depan, antara lain:

1. Melanjutkan Program Mandiri Benih dan penyediaan bibit unggul, serta optimalisasi lahan kosong melalui program *urban farming* untuk komoditas bawang merah, rica/cabai, tomat (barito) di pekarangan, lahan sekolah, dan pesantren guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
2. Pemanfaatan teknologi pascapanen, seperti sinar gamma dan ozonisasi guna memperlambat pembusukan produk hortikultura.
3. Penyediaan *cold storage* di lokasi pendaratan ikan (PPI) serta pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan hasil tangkapan.
4. Mendorong kerja sama antara petani dan *offtaker* melalui pola kontrak yang disupervisi pemerintah daerah, guna memastikan penyerapan hasil produksi dan stabilitas harga
5. Fokus GPM & Operasi Pasar diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi, seperti aneka cabai, bawang merah, ikan segar dan minyak goreng, dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta didukung pemberian subsidi ongkos distribusi.
6. Penggunaan dana BTT untuk operasi pasar murah dalam rangka stabilisasi harga dalam jangka pendek (Dasar Hukum: Permendagri No.15 Tahun 2024).
7. Pengkinian Website Neraca Pangan oleh Pemerintah Kota/Kab dengan data yang andal (*reliable*) dan terkini (*timely*), khususnya dalam pencatatan arus keluar komoditas pangan, guna mendukung perumusan kebijakan yang efektif dan dasar faktual untuk melakukan kerja sama ketahanan pangan antar daerah.

Penambahan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi Minyak Kita karena hampir seluruh kab/kota di Sulsel berada di atas HET.